

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009
- AB Massier, 2000, Handelsrecht, KITLV Uitgeverij, Leiden
- Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Ed. 1, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta (selanjutnya disingkat Adrian Sutedi I)
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafinso, Jakarta, 2014,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* . Cet 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1999
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* . Cet 8. Jakarta: Djambatan, 1999. hlm 24 "
- Boedi Harsono, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi (Jakarta: Djambatan, 2008),
- C.S.T Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, 1989, Balai Pustaka
- Effendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali, 1990
- Effendi Perangin,, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, 2007, Jual-Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Hepi Hapsari, Pemetaan Partisipatif Potensi Desa, (Surabaya: Jurnal Teknik Geomatikal, Institut Teknologi Surabaya, 2017),

- I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, STPN Press, Cet.1 , Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1991)
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (Surabaya : Arkola, 2002)
- Irma Devita Purnamasari, 2010, *Hukum Pertanahan*, PT Mizan Pustaka, Bandung
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Arkola, 2003
- J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Lisa Esti AA Kunto A, *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, ed. by Pusaka Merah Putih (Yogyakarta: puaka merah putih, 2008)
- M.H Dr.Urip Santoso, S.H., *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta*, ed. by Kencana, 1st edn Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016
- M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Madju, 2010
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Wijaya, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I)
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat R. Subekti II)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006
- Rudiyanto, Arifin dkk, '*Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Di Indonesia*, Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Desember (2006),
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung 1991
- Satjipto Rahadjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta,

- Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* PT Revika Aditama, Bandung,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan : Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenanda Media Grup : Surabaya, 2012.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media. 2014
- Y.W.Sunindhia dan Ninik Widayanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010

B. JURNAL ILMIAH

- Aloysius Susanto, *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*, Jurnal, Seminar Nasional, 2016
- Eka Puji Setiyarini, 2014, ”Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang,

- Eko Budianto, “Analisis Pasal 51 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006,” *Jurnal FAIRNESS AND JUSTICE* Volume 7, no. 1 (2011)
- Hendry Dwicahyo Wanda, Rusdianto Sesung ‘Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C’, *Jurnal Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 7, Nomor 2, Oktober 2017, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya 2017
- Ida Ayu Wulan Rismayanthi, ‘Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa’, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015-2016.
- Ima Erлие Yuana,”Tanggungjawab notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris”, *Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010
- Melita Ma’dika Ambarura, ‘Pelaksanaan Peralihan Dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Toraja Utara’ *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta’.*, Jogjakarta, 2015
- Valerio Xaverius Tjipto, ‘Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No.16/Pdt.G/2015/Pn.Krg)’, *Recital Review*, 2 (2020), 65
- Tamrin Muchsin dkk, “Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum”. Madani Legal review. Vol. 4 No. 1 Juni 2020, Madani Legal Review Malrev 2020
- Kadek Cahya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid,” *Jurnal Crepido: Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* Volume 01, no. 01. Januari (2019)
- Mikha Ch. Kaunang , ‘Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’ *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016
- Nurlinda, Ida , *Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 1, No 1, 2016. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Universitas Medan Area, *Tinjauan Pustaka Tentang Sengketa Pertanahan* di akses pada 22 Januari 2021

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1986)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah” (1998), Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah” (2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 tanggal 11 September 1989 tentang Penyempurna Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

D. LAIN-LAIN

a. Disertasi

Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Kekayaan Intelektual, Program Doktor Universitas Diponegoro, Disertasi, Semarang, 2002

b. Makalah Ilmiah

H. Syafruddin Kalo, 2007, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran”, Makalahpada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Tanggal 27 April 2007

b. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 96/PDT/2018/PT.JMB diakses pada 2 Januari 2021

d. Internet

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 9 September 2020 Pukul 15.00 WIB.

Paparan H.Surjadi Jasin, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam <http://www.pikiranrakyat.co>, “ *Teliti Sebelum membeli Tanah atau Rumah*”, tanggal 31 Januari 2004